

# Elisabet Mo'i

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 31-May-2022 11:09PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1742881020

**File name:** Elisabet\_Mo\_i.docx (202.65K)

**Word count:** 1395

**Character count:** 9054

**DAMPAK PENURUNAN TARIF DAN PERUBAHAN PEMBAYARAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA KALISONGO PADA  
SAAT PANDEMI COVID -19**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

**AKUNTANSI**



Disusun oleh :

**ELISABET MO'I**

**NIM : 2018110148**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2022**

## **DAMPAK PENURUNAN TARIF DAN PERUBAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA KALISONGO PADA SAAT PANDEMI COVID -19**

### **1 RINGKASAN**

Kepatuhan Wajib Pajak didasarkan oleh adanya faktor pemahaman perpajakan dan kesadaran untuk membayar pajak. Dalam kebijakan yang ditetapkan melalui Undang – Undang menyatakan bahwa semua wajib pajak harus membayar pajak sesuai besarnya pendapatan. Tujuan dari penelitian yakni mengetahui kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Kalisongo secara parsial. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Cara untuk menentukan setiap sampel peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel yang didapatkan 30 Wajib Pajak UMKM. Untuk mengumpulkan data peneliti terjun langsung ke lapangan dengan cara membagi kuesioner dan dokumentasi. Metode analisa data untuk mengetahui hasil, data diolah menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS. Dari olahan data membuktikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bagi UMKM Desa Kalisongo dengan nilai  $t_{\text{tabel}} = 2,582$  dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bagi UMKM Desa Kalisongo dengan nilai  $t_{\text{tabel}} = 566$ . Untuk meningkatkan hasil Pajak harus adanya kesadaran dari semua wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu, karena peran pajak sangat penting untuk memajukan perekonomian di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Penurunan tarif pajak, Cara pembayaran Pajak, Kepatuhan UMKM*

### **3 BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerapan kebijakan pajak sejak dahulu memiliki masalah yang belum sampai saat ini dapat diselesaikan, yaitu mengenai kepatuhan membayar pajak di masyarakat. Rasio mengenai tingkat patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak dinilai kecil setiap tahunnya yang dimana ditandai dengan lebih kecilnya wajib pajak yang membayar pajak dibandingkan dengan keseluruhan dari wajib pajak (Martowardojo, 2011).

Pajak merupakan bagian penting dalam mendukung pendapatan kas negara. Pendapatan berdasarkan pajak dapat mencapai 70% dari APBN (Damayanti *et al.*, 2015). Pajak memiliki

2 fungsi yaitu yang pertama sebagai pendanaan, kemudian yang kedua berguna sebagai peraturan pada sektor sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2013), pajak memiliki tujuan untuk pendapatan negara yang kemudian akan dipergunakan kembali dalam mendanai seluruh pembangunan nasional.

Fahluzy (2014) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak oleh wajib pajak yaitu efektivitas sistem pajak dan pemahaman mengenai pajak. Rahayu (2013) menjelaskan pentingnya wajib pajak untuk memahami aturan mengenai pajak, khususnya di saat pandemi sekarang dimana kegiatan sosial sangat dibatasi untuk mencegah penularan Covid-19.

Ditemukan beberapa pedagang masih berjualan di saat peraturan pemberlakuan *physical distancing* digencarkan, mereka memiliki risiko tinggi untuk ditertibkan oleh penegak hukum. Namun mereka berjualan karena bergantung pada kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-harinya, jika mereka tidak berjualan maka mereka dapat kehilangan sumber pendapatan mereka dan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup, hal inilah yang dapat membuat ekonomi di Indonesia menurun.

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi ini berdampak signifikan dimana perekonomian Indonesia sempat mengalami resesi, para pedagang membutuhkan konsumen, PHK yang terjadi dimana-mana serta banyak perusahaan besar memutuskan untuk menonaktifkan sementara usahanya akibat penjualan yang menurun drastis dan menanti adanya stabilitas modal yang memadai (Suhendri et al.,2022).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merasakan dampak yang sangat berarti bagi usahanya dimana banyak ditemukan UMKM yang gulung tikar akibat tidak mempunya membiayai beberapa kegiatan usaha dan menurunnya penjualan. Hal ini membuat Pemerintah diperlukan untuk memutuskan peraturan yang dapat menstabilkan dan menyelamatkan

ekonomi negara dengan menerapkan peraturan relaksi yang diambil dari APBN untuk memulihkan sektor ekonomi nasional.

Pajak adalah pendapatan negara dimana memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN. Berhasilnya negara dalam pendapatan pajak ditandai dengan stabilitas ekonomi yang terjaga dan terus tumbuh (Listiyowati et.al, 2020). Pajak berfungsi penunjang perekonomian suatu negara dan untuk menggerakkan roda pemerintahan serta membangun kesejahteraan masyarakat. Negara perlu untuk bertahan dalam semakin tingginya kebutuhan masyarakat dan rumitnya perkembangan zaman dengan terus melakukan pembangunan yang dibiayai oleh pajak (Listiyowati et.al, 2015).

Pandemi saat ini berdampak pada -perekonomian khususnya sektor UMKM dimana terus mengalami penurunan penjualan, tidak dapatnya mengakses bahan baku dan SDM yang masih rendah. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan tingkat penjualan dan tidak banyak yang mengalami kebangkrutan akibat tidak dapat bertahan dimasa pandemi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk terhindar dari kerugian yang besar dengan cara mengurangi pembiayaan yang besar. Pemerintah kemudian memberikan stimulus kepada para pelaku UMKM dengan memberikan tarif pajak yang lebih rendah untuk menjaga kestabilan negara tetap mendapatkan pajak tanpa membebani para pelaku usaha. Maka dikeluarkanlah kebijakan Menkeu No. 44/PMK.03/2020 yang mengatur insentif wajib pajak dimasa Covid-19.

Namun peneliti masih banyak menemukan adanya para pelaku UMKM yang belum menggunakan manfaat peraturan tersebut, mengingat tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meskipun telah diberi insentif pajak bagi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM pula belum banyak yang memahami secara betul peran pajak dalam meningkatkan perekonomian nasional terlebih saat ini peran UMKM memiliki potensi untuk dapat menyelamatkan krisis ekonomi di masa pandemi seperti pada krisis moneter tahun 1998 (Suhendri et.al,2018)

Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak masih dinilai rendah. Ketaatan terhadap pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti struktur organisasi, penegakan hukum, tenaga kerja dan lainnya. Kepatuhan pajak di lingkungan UMKM masih dinilai perlu untuk ditertibkan dan dicari solusinya. Banyak ditemukan UMKM yang tidak mengetahui bahwa bisnis yang dijalankan termasuk pada kategori usaha yang memiliki laba kurang dari Rp 4,8 Milyar selama setahun. Maka diperlukan sosialisasi mengenai informasi penting terkait pajak sehingga para pelaku UMKM dapat berpartisipasi untuk membayar pajak dalam rangka turut memajukan perekonomian nasional. Diperlukan kerja sama yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dan pihak lainnya untuk melaksanakan penegakan peraturan pajak mengingat banyaknya total para pelaku UMKM di Indonesia (Lisyowati et.al, 2020 )

<sup>6</sup> Usaha Mikro adalah usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dengan nilai aset paling banyak Rp50 juta rupiah. Usaha mikro memiliki peran strategis yaitu memperluas dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah, <sup>5</sup> mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional (UU <sup>5</sup> No. 20 Tahun 2008). Usaha mikro telah membuktikan ketangguhannya dalam <sup>4</sup> krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1997 – 1988 dan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 (Suhendri et al., 2017).

Memburuknya perekonomian nasional akibat dampak dari Covid-19 menyebabkan kelumpuhan di beberapa sektor. Pembatasan kegiatan sosial berdampak pada perekonomian serta psikologi masyarakat yang tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Sektor perbelanjaan pula mengalami dampak yang sama dimana mereka mengalami penurunan penjualan yang drastis akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Berbagai sektor saat ini mengalami penurunan penjualan akibat dampak Covid-19 khususnya pada pelaku UMKM yang memiliki peran besar terhadap roda perekonomian nasional (Rahajeng, 2021). Diperlukan pendampingan bagi para pelaku UMKM dengan berbagai pihak untuk tetap melakukan

aktivitas ekonomi dengan berbagai strategi sehingga dapat tumbuh kembali untuk stabilisasi ekonomi Indonesia.

Penurunan penjualan yang dialami pelaku UMKM maka diterbitkan peraturan mengenai insentif pajak untuk tidak melakukan pembayaran PPh Final 0,5% yang ditujukan kepada para pelaku UMKM. Berdasarkan penjelasan yang telah disusun, peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian yang berjudul **“DAMPAK PENURUNAN TARIF DAN PERUBAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA KALISONGO PADA SAAT PANDEMI COVID -19”**

### 1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana dampak penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19, Di UMKM Desa Kalisongo
2. Bagaimana dampak perubahan cara membayar pajak terhadap wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19, Di UMKM Desa Kalisongo

### 1.3 Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19 , Di UMKM Desa Kalisongo
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan cara membayar pajak terhadap wajib pajak pada UMKM saat pandemi covid -19, Di UMKM Desa Kalisongo

### 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi Peneliti

- a. Peneliti dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

b. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan lebih mengenai dunia kerja khususnya dalam sektor UMKM.

1. Bagi Universitas

Sesuai dengan hasil penelitian dapat menambah wawasan serta pemahaman terkait dengan dampak penurunan tarif dan perubahan cara pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada saat pandemi covid -19 untuk menunjang perkuliahan yang membahas mengenai perubahan cara membayar pajak.

1. Bagi UMKM

a. Sebagai pendukung dalam kerja sama yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap pelaku UMKM.

b. Dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan aktivitas di UMKM khususnya dalam informasi kepatuhan pembayaran pajak.

1. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan mengenai perumusan tema yang sama di penelitian berikutnya.



## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a> Internet Source	16%
2	Lutfah Fadilah, Asrofi Langgeng Noermansyah, Krisdiyawati Krisdiyawati. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19", Owner, 2021 Publication	2%
3	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
5	Nur Wanita. "Perkembangan Mikro Kecil dan Menengah di Pasar Manonda Palu", ISTIQRRA, 2015 Publication	1%
6	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a>	

---

Internet Source

1 %

---

8

vdocuments.site

Internet Source

1 %

---

9

Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati.  
"THE EFFECT OF AWARENESS, MORALITY, TAX  
CULTURE, AND DISTRIBUTIVE JUSTICE ON THE  
TAXPAYER COMPLIANCE", ACCRUALS  
(Accounting Research Journal of Sutaatmadja),  
2021

Publication

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On